

EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMUDA SARJANA PENGGERAK PEMBANGUNAN DI PERDESAAN (PSP-3) DI KOTA SAMARINDA

Kuncari Isnawati¹

¹Mahasiswa Magister Administrasi Publik FISIP Unmul

Alamat Korespondensi : kuncariisnawati194@gmail.com

Abstract

The result research showed that the Bachelor program in rural development (PSP-3) in Samarinda is located of Sungai Siring district, Tanah Merah district (North Samarinda) and the Sindang Sari district, Makroman District and Sungai Kapih district (Sambutan district) has not fulfilled the criteria os effective, efficient, adequacy, similarity, accuracy as for the criteria, not all programs meet this criterion.

Keywords: Evaluation, PSP-3, Policy

Abstrak

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (PSP-3) di Kota Samarinda yang berada di lokasi kelurahan Sungai Siring, Tanah Merah (kecamatan Samarinda Utara) dan kelurahan Sindang Sari, Makroman, dan Sungai Kapih (kecamatan Sambutan) belum memenuhi kriteria efektif, efisien, kecukupan, kesamaan, ketepatan.

Kata Kunci: Evaluasi, PSP-3, Kebijakan

Pendahuluan

Keberhasilan pembangunan suatu negara tidak lepas dari peran pemuda. Baik itu pembangunan di perkotaan maupun di perdesaan. Pemuda yang ada merupakan sumber daya manusia (SDM) yang butuh pelatihan, pendidikan, sehingga mampu menjadi pemuda yang handal serta memiliki daya saing agar bisa membangun bangsa dan negaranya. Jiwa kepeloporan di dalam diri pemuda menjadi salah satu contoh untuk membangun negaranya termasuk di seluruh penjuru wilayah Indonesia. Dalam hal ini fokus pembangunannya adalah di kawasan perdesaan. Pemerintah Indonesia, khususnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan fasilitas bagi pemuda yang berpotensi untuk membangun desa melalui program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (PSP-3).

Menilik sejarah program (PSP-3) ini adalah gagasan pemerintah yang dilatarbelakangi oleh tiga permasalahan yaitu: pemuda berpendidikan yang bekerja, pembangunan perdesaan, pemuda dan dinamika kebangsaan. Adanya kesenjangan antara jumlah masyarakat yang mengenyam pendidikan di SD, SMP, SMA, SMK, Diploma I,II/III serta tingkat universitas dengan kategori usia penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkannya. Contohnya, pada tahun 2013 menurut data BPS (BPS,2013) menunjukkan bahwa ditingkat universitas, lulusan yang bekerja hanya sekitar 7,94 juta orang sedangkan paling tinggi penduduk yang bekerja sebesar 54,62 juta jiwa dengan riwayat tamat SD. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja belum terserap dengan baik. Dari dasar

itulah, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menggagas program Pemuda Sarjana Pembangunan di Perdesaan (PSP-3). Program (PSP-3) ini merupakan Program Nasional yang dirancang dan dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, dan dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan kementerian/lembaga negara lainnya, pemerintah daerah, perguruan tinggi serta Forum Purna (PSP-3) di masing-masing provinsi (Kemenpora, 2014:28).

Program (PSP-3) ini dimulai sejak tahun 1989 dengan tujuan untuk memajukan kehidupan dan mensejahterakan masyarakat di kawasan perdesaan. Program ini dilaksanakan oleh pemuda sarjana sebagai salah satu penggerak dan pionir di perdesaan. Seiring berjalannya waktu, kehadiran pemuda sarjana yang menjalankan program di perdesaan membuahkan manfaat bagi warga di perdesaan. Akhirnya, program ini terus berjalan dari tahun 1989. Mencapai puncaknya pada tahun 1996 dan 1997 dengan jumlah masing-masing 1.500 orang dan tahun 1998 sebanyak 1.600 orang pemuda sarjana. Kejayaan ini tidak berlangsung lama karena terjadi penurunan dari tahun 1999 sampai tahun 2012. Pemuda yang direkrut hanya sebanyak 400 hingga 500 pemuda sarjana. Adapun data yang penulis peroleh, tahun 2012 sejumlah 16.567 orang dan tersebar kurang lebih 5.140 desa di 3.220 kabupaten/kota seluruh Indonesia (www.viva.co.id).

Adapun (PSP-3) yang ada di Kalimantan Timur yang menjadi fokus yang akan di teliti adalah tahun 2016. Secara garis besar, di Kalimantan Timur daerah yang menjadi sasaran program (PSP-3) adalah Kutai Timur, Penajam Paser Utara, Penajam, Bontang, dan Samarinda. Tahun 2016 ini program (PSP-3) adalah angkatan yang ke-25 (XXV). Dalam penulisan ini, penulis memilih program (PSP-3) yang ada di kota Samarinda. Adapun kecamatan yang menjadi program (PSP-3) adalah Sambutan dan Samarinda Utara. Di Sambutan sendiri kelurahan yang terpilih yaitu: kelurahan Makroman, Sei.Kapih, dan Sindang Sari. Untuk Kecamatan Samarinda Utara, kelurahan yang terpilih yaitu: Sungai Siring dan Tanah Merah.

Adapun program (PSP-3) ini melalui perekrutan dengan memilih pemuda sarjana yang berprestasi melalui seleksi yaitu: seleksi administratif, tes tertulis dan tes wawancara. Di Samarinda sendiri, sarjana yang terpilih membuat usaha bidang kewirausahaan diantaranya usaha Budidaya Ubi Ungu, budidaya ikan Nila, sedangkan di Kecamatan Sambutan, sarjana yang terpilih membuat usaha Budidaya Tanaman Obat Keluarga (Toga), budidaya ikan Lele, pengolahan tepung Mocaf (*modified cassava flour*) dan aneka kue kering serta kue basah.

Kondisi saat ini, sejak tahun 2017 program (PSP-3) sudah tidak berjalan lagi. Saat ini, belum diketahui pula sarjana yang telah terpilih di kecamatan Samarinda Utara dan Kecamatan Sambutan apakah masih menjalankan usahanya atau tidak. Tentu hal ini berkaitan dengan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) yang mengelola program tersebut. Penulis juga melihat bahwa setelah program (PSP-3) ini selesai

harus ada keberlanjutan program di desa yang ditinggalkan dan dilaksanakan oleh pemuda yang ada di desa tersebut. Hal ini sesuai dengan indikator keberhasilan (PSP-3) dalam buku pedoman umum pelaksanaan program (PSP-3), indikator ke-3 yaitu: adanya keberlanjutan kegiatan di tingkat masyarakat yang meliputi: tersedianya kader pemimpin (SDM lokal) yang dipersiapkan untuk menggantikan peran (PSP-3), sehingga dapat menjamin keberlanjutan program. Namun, salah satu indikator ini di kota Samarinda belum ada bahkan sarjana yang telah terpilih di kecamatan Samarinda Utara dan Kecamatan Sambutan yang berasal dari Kabupaten Paser, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara sudah kembali ke daerahnya masing-masing. Inilah yang menjadi permasalahan di Samarinda, khususnya 2 kecamatan yang terpilih untuk dilaksanakan program (PSP-3) terkait dengan pemberdayaan dan sumber daya manusia yang mengelolanya. Mengenai Sumber Daya Manusia di (PSP-3) berkaitan erat dengan tugas yang di lakukan yaitu: bidang penggerakan, bidang pendampingan dan bidang kemandirian kepada masyarakat di desa yang diamanatkan kepada peserta (PSP-3).

Adapun jika melihat jumlah sarjana yang terpilih di kecamatan Sambutan dan Samarinda Utara masing-masing ada 4 orang dan 3 orang. Selain daripada itu, di Dispora Provinsi Kalimantan Timur dari hasil observasi peneliti, pihak Dispora Kaltim mengatakan bahwa Laporan (PSP-3) belum dilakukan pemeriksaan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Oleh sebab itu, penulis mengambil program (PSP-3) untuk diteliti dengan judul "Evaluasi Kebijakan Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (PSP-3) di Kota Samarinda.

Kerangka Konsep Teori Evaluasi Kebijakan Publik

Dalam proses terakhir sebuah kebijakan adalah evaluasi. Evaluasi adalah prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk menghasilkan informasi mengenai nilai atau manfaat dari serangkaian aksi di masa lalu dan atau di masa depan (Dunn, 2003:132). Dari uraian ini dapat dipahami bahwa evaluasi merupakan penilaian kebijakan mengenai nilai atau manfaat atas kegiatan di masa lalu atau di masa depan untuk menghasilkan informasi. Karakteristik evaluasi dapat dipahami sebagai unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif, dan peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan (Dunn, 2003:24). Dalam hal ini aktor-aktor politik akan dinilai apakah mereka memenuhi syarat undang-undang atau tidak dalam pembuatan kebijakan dan apakah pencapaian tujuan itu selaras dengan kebijakan yang akan diambil.

Dalam melakukan evaluasi kebijakan, adanya fokus tujuan yang akan dicapai oleh aktor yang mengevaluasi. Adapun tujuan evaluasi kebijakan adalah sebagai berikut (Subarsono, 2005:120-121):

- a. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan, melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
- b. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
- c. Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
- d. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
- e. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
- f. Sebagai bahan melakukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kualitatif yang memiliki tiga kunci utama yaitu mengambil fakta berdasarkan atas pemahaman subjek (*verstehen*), hasil pengamatan secara rinci dan mendalam (*thick description*) dan berupaya menemukan hasil teoritis baru yang jauh dari teori yang telah ada (Kholifah dan Suyadya, 2018:14). Fokus penelitian pada enam kriteria untuk menilai evaluasi kebijakan yaitu: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Adanya batasan masalah dalam penelitian kualitatif yang menjadi fokus bahasan oleh peneliti terhadap obyek yang telah dipilih yang selanjutnya akan dilakukan observasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: penelitian lapangan yang terdiri atas observasi dan wawancara serta penelitian kepustakaan. *Sampling* dengan menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam Saldana, 2014)

Hasil dan Pembahasan

Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (PSP-3)

Pengertian Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (PSP-3). Sarjana adalah seseorang yang sudah menyelesaikan studi di pendidikan tinggi pada jalur pendidikan sekolah (S-1) yang mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi, merumuskan, memecahkan masalah, mempunyai jiwa kepemimpinan, sikap kemandirian dan jiwa patriotisme serta mampu menjadi perintis untuk melakukan terobosan-terobosan di perdesaan (Nurhapida, 2016). Dari pengertian ini dapat dijelaskan bahwa sarjana adalah orang yang telah menyelesaikan pendidikannya di perguruan

tinggi dan memiliki kemampuan untuk melakukan inovasi ataupun terobosan-terobosan baru di perdesaan.

Sarjana memiliki peran sebagai penggerak pembangunan. Adapun pengertian penggerak itu sendiri dan mampu menggerakkan warga masyarakat, generasi muda atau pemuda di desa untuk berpartisipasi guna menjalankan kegiatan produktif, kreatif dan inovatif untuk menggerakkan potensi desa yang lebih baik (Nurhapida, 2016). Dalam hal ini seorang sarjana berperan sebagai penggerak untuk melakukan kegiatan di perdesaan dengan memanfaatkan potensi yang ada di desa serta mengajak masyarakat untuk ikut serta berperan dalam pembangunan desanya. Dalam pelaksanaan Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan, adanya strategi yang dilakukan untuk bisa meningkatkan efektivitas dan keberhasilan program (PSP-3). Adapun strategi yang digunakan yaitu:

1. Strategi Pendekatan

Strategi pendekatan dibagi menjadi 5 strategi yaitu:

- 1) Pemetaan (*mapping*). Hal ini dimaksud untuk mengetahui kondisi dan potensi desa yang akan menjadi lokasi penempatan program (PSP-3) dan masyarakat yang menjadi dampingan. Selain itu juga memetakan peluang kerjasama dengan lembaga lain, baik pemerintah, BUMN maupun swasta.
- 2) Penguatan kapasitas (*capacity building*), bertujuan untuk mengembangkan potensi sumberdaya (PSP-3) dan masyarakat dampingan oleh Tim Asistensi, Dispora Kabupaten/Kota
- 3) Pemberdayaan Masyarakat (*community empowering*), merupakan strategi untuk memberdayakan masyarakat dalam upaya perbaikan kesejahteraan.
- 4) Pengembangan jaringan (*networking*), strategi yang berupaya membangun jaringan dengan sumberdaya lain guna mendukung pencapaian hasil program.
- 5) Pemasaran Program (*social marketing*), strategi untuk mempromosikan dan menyebarluaskan kegiatan terbaik (*best practice*) dari (PSP-3) ke masyarakat luas melalui media cetak, elektronik dan online. (Kemenpora, 2011).

2. Strategi Operasional

Strategi operasional yang digunakan dalam program (PSP-3) adalah berupa tahapan-tahapan operasional program yang dilaksanakan selama dua tahun dan melalui empat tahapan operasional sebagai berikut: Tahap pengenalan. Target yang harus dicapai oleh peserta (PSP-3) adalah masyarakat mengenal keberadaan (PSP-3) dan tujuan programnya. Kemudian tahap rintisan. Peserta (PSP-3) dapat mengorganisir masyarakat untuk memulai rintisan usaha di bidang keuangan (simpan pinjam), ekonomi produktif, member asistensi pengelolaan pemerintahan desa, teknologi informasi dan pendidikan bangsa. Dalam rintisan kegiatan, kelembagaan/kelembagaan sudah terbentuk untuk membantu dan mendukung kegiatan. Tahap

konsolidasi yaitu rintisan kegiatan produktif masyarakat dan kelembagaan/kelompok usaha bersama diharapkan sudah mulai berfungsi, sehingga peserta (PSP-3) dapat melakukan konsolidasi baik untuk memperkuat maupun memperluas hasil yang telah dicapai. Tahap kemandirian. Dengan berjalan dan berkembangnya kegiatan usaha bidang keuangan (simpan pinjam), ekonomi produktif, manajemen pemerintahan desa dan teknologi informasi, maka peserta (PSP-3) mulai membangun kemandirian melalui penyiapan kader lokal maupun pengembangan usaha mandiri.

Penyelenggaraan program (PSP-3) terdiri dari beberapa langkah kegiatan yang merupakan tahapan dalam pelaksanaan program ini. Langkah-langkah kegiatan tersebut yaitu adanya sosialisasi dan diseminasi. Sosialisasi dan diseminasi ini dilakukan oleh pelaksana program (PSP-3) ditingkat pusat, provinsi dan daerah kabupaten/kota. Melalui berbagai media seperti media elektronik, media cetak dan media sosial, program ini digaungkan. Untuk daerah provinsi sendiri, sosialisasi dilakukan dengan beberapa tahap yaitu: adanya tatap muka dengan calon peserta (PSP-3), penyebaran informasi oleh peserta (PSP-3) yang sedang berada di lokasi/lapangan maupun oleh purna (PSP-3) yang berada di seluruh provinsi di Indonesia.

Kriteria Efektivitas

Pada kriteria ini, kegiatan yang dilakukan oleh peserta (PSP-3) di lima kelurahan masih belum efektif. Hal ini disebabkan kegiatan yang dilakukan oleh peserta di desa penempatan belum memberikan dampak signifikan. Pada kriteria ini berguna untuk menilai alternatif kebijakan yang mencapai hasil yang diharapkan. Adapun kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan juga mempengaruhi hasil yang menjadi tujuan pelaksanaan kegiatan.

Kriteria Efisiensi

Pada kriteria ini berkenaan dengan jumlah usaha yang dilakukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, kegiatan yang dilakukan oleh peserta (PSP-3) belum 100% efisien. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala dilapangan yaitu: waktu pelaksanaan kegiatan yang hanya sebentar saja. Contoh pada budidaya ikan Nila yang tidak diteruskan kembali oleh pemuda di desa setempat, kemudian air yang digunakan memiliki kadar asam yang tidak cocok untuk budidaya ikan Nila. Selanjutnya, budidaya ubi ungu dan pembuatan keripik ubi ungu yang dinilai tidak sesuai harapan. Kendala yang ditemukan antara lain masyarakat yang kurang berminat untuk mengkonsumsi ubi ungu, kemudian penanaman ubi ungu yang tidak berhasil sehingga peserta (PSP-3) membeli ubi ungu dari pihak lain agar produk olahan berbahan dasar ubi ungu bisa di buat.

Adapun kegiatan yang ada di kecamatan Sambutan yang terbagi di kelurahan Sindang Sari, Makroman dan Sungai Kapih juga dinilai belum efisien. Peserta (PSP-3) di kelurahan Sindang Sari pada awalnya menanam

brokoli dan kembang kol dan hasilnya gagal. Kemudian, mencoba budidaya Tanaman Obat Keluarga (TOGA) dan akhirnya dinilai cukup berhasil serta memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Kriteria Kecukupan

Untuk menentukan suatu kesuksesan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan adalah tingkat kepuasan dari segi terpenuhinya semua kebutuhan yang dicapai. Berdasarkan hal ini, maka kegiatan yang dilakukan oleh peserta (PSP-3) di kota Samarinda belum memberikan kesamaan kesejahteraan bagi pemuda maupun masyarakat sekitar. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian di lapangan yang menunjukkan bahwa tidak tersedianya kader pemimpin atau pemuda yang meneruskan kegiatan yang telah dirintis oleh peserta (PSP-3). Ini merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pada program (PSP-3) ini berdasarkan buku pedoman pelaksanaan program (PSP-3). Selain hal itu, belum adanya pengelolaan kegiatan produktif yang dapat dijalankan oleh kader masyarakat meskipun tanpa keberadaan peserta (PSP-3). Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kelurahan, rata-rata dari jawaban responden menjawab bahwa kegiatan yang dilakukan belum memberikan nilai yang diharapkan, peserta (PSP-3) masih tahap pembelajaran, hanya sisi kebermanfaatn sosial saja yang di rasakan, manfaat ekonomi belum bisa dirasakan sehingga untuk menunjang pendapatan masyarakat belum berhasil dilakukan.

Kriteria Kesamaan

Kriteria kesamaan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dari usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn, 2003:434). Dari pendapat ini maka kegiatan yang dilakukan oleh peserta (PSP-3) di lima kelurahan belum memberikan pengaruh perubahan kesejahteraan yang merata bagi pemuda dan masyarakat sekitar di lokasi penempatan. Contohnya pada produk tepung Mocaf yang direalisasikan di kelurahan Makroman. Masyarakat masih awam untuk menggunakan produk baru bahkan timbul rasa takut. Hal ini menjadi informasi bahwa program yang dilakukan oleh peserta kurang dibutuhkan oleh pemuda atau masyarakat sekitar. Selanjutnya, untuk program budidaya ikan Nila di kelurahan Sungai Siring belum memberikan hasil dari segi ekonomi dan juga tidak ada rincian yang jelas dalam penggunaan anggaran untuk membuat suatu kegiatan. Kemudian, budidaya ikan Lele dan kerupuk ikan Lele yang belum berhasil dan bisa dikatakan gagal, karena peserta (PSP-3) jarang berada di lokasi penempatan program (PSP-3).

Kriteria Responsivitas

Pada kriteria ini berkenanan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok

masyarakat tertentu (Dunn, 2003:437). Dalam hal ini, kegiatan yang dilakukan oleh peserta (PSP-3) di lima kelurahan memang mendapat respon yang baik dari pihak kecamatan, kelurahan, hingga masyarakat setempat. Program pemuda sarjana penggerak pembangunan di perdesaan (PSP-3) diharapkan mampu memberikan manfaat dan perubahan di desa penempatan sesuai dengan latar belakang potensi desa masing-masing walaupun dalam pelaksanaan kegiatan banyak kendala sehingga potensi keberhasilan belum sesuai harapan

Kriteria Ketepatan

Kriteria ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantif karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama (Dunn, 2003:438). Dari pendapat ini, kriteria ketepatan berkaitan dengan tujuan suatu kegiatan telah tepat dilaksanakan di masyarakat atau tidak. Dari kegiatan yang dilakukan oleh peserta (PSP-3) di lima kelurahan, dapat dijelaskan bahwa: program budidaya ikan Nila di kelurahan Sungai Siring belum tepat dilaksanakan. Seharusnya budidaya ikan Lele yang dilakukan karena jenis air yang cocok untuk budidaya ikan tersebut. Kemudian, pengolahan singkong menjadi tepung Mocaf dan aneka kue basah lainnya belum tepat dilakukan di kelurahan Makroman. Hal ini disebabkan, masyarakat masih awam dan menganggap hal baru terhadap produk tepung mocaf sehingga ada rasa takut untuk mengkonsumsinya.

Adapun kegiatan yang telah tepat dilakukan yaitu: kegiatan budidaya ubi ungu dan pengolahan keripik ubi ungu di kelurahan Tanah Merah. Walaupun kegiatan ini belum berhasil dan tidak sesuai harapan, namun masyarakatnya yang sebelumnya telah menanam ubi ungu dan pernah terhenti dapat menanam kembali walaupun tidak banyak dilakukan oleh petani di lokasi tersebut. Kemudian, budidaya Tanaman Obat Keluarga (TOGA) di kelurahan Sidang Sari yang dinilai cukup berhasil. Selanjutnya, budidaya ikan Lele dan kerupuk ikan Lele yang sudah tepat dilakukan di kelurahan Sungai Kapih karena sesuai dengan potensi desa walaupun dalam pelaksanaan belum berhasil disebabkan peserta (PSP-3) jarang berada di lokasi penempatan.

Faktor Pendukung

Adapun faktor pendukung kegiatan yang dilakukan oleh peserta (PSP-3) di lima kelurahan adalah adanya dukungan dari berbagai pihak baik itu pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga, Dispora Kota, Dispora Provinsi Kalimantan Timur, pihak kecamatan, kelurahan dan masyarakat setempat yang lokasinya menjadi penempatan program (PSP-3). Selain itu, adanya dana rintisan untuk pelaksanaan kegiatan di desa penempatan sebesar Rp. 15.000.000,- dan juga dana untuk biaya hidup sebesar Rp. 3.500.000,-. Selain daripada itu, adanya monitoring dan evaluasi secara berkala oleh pihak Dinas

Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur setiap 3 bulan pertama setelah penempatan kemudian adanya pelatihan untuk penguatan kapasitas.

Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam pelaksanaan program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (PSP-3) di Kota Samarinda antara lain pembimbingan yang dilakukan oleh peserta (PSP-3) kepada pemuda di lokasi berujung di tengah jalan disebabkan banyak pemuda yang bekerja, ada juga yang kurang berminat terhadap produk yang dihasilkan oleh peserta, ada peserta yang jarang dilokasi penempatan dan sulit dihubungi, masih belum optimalnya keterampilan kewirausahaan, minimnya pengalaman dalam kegiatan ekonomi yang dimiliki oleh peserta (PSP-3), dan biaya bulanan yang sering terlambat diberikan kepada peserta (PSP-3) menjadi salah satu faktor di lokasi penempatan. Salah satu indikator keberhasilan tidak tercapai yaitu: tidak adanya penerus/pemuda yang melanjutkan program di daerah penempatan setelah program ini selesai dan peserta (PSP-3) sudah kembali ke daerah asalnya. Selanjutnya, perbedaan latar belakang pendidikan dan kegiatan yang dilakukan juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam keberhasilan suatu kegiatan.

Kesimpulan

Evaluasi Kebijakan Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (PSP-3) di Kota Samarinda di dua kecamatan dengan total lima kelurahan yaitu: kelurahan Tanah Merah, Sungai Siring (kecamatan Samarinda Utara) dan kelurahan Sindang Sari, Makroman, Sungai Kapih (kecamatan Sambutan) yaitu: Penilaian dari kriteria efektivitas, kegiatan yang dilaksanakan peserta (PSP-3) kurang efektif hal ini disebabkan oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peserta (PSP-3) belum memberikan dampak yang signifikan karena kendala-kendala yang dihadapi.

Dari kriteria efisiensi, program (PSP-3) di kota Samarinda belum bisa memuaskan kebutuhan, nilai, suatu kelompok atau masyarakat. Peserta (PSP-3) tidak merincikan realisasi anggaran dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan sehingga pengukuran kinerja sulit dilakukan.

Kriteria kecukupan (*adequacy*), pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh peserta (PSP-3) belum memberikan kesamaan kesejahteraan bagi pemuda maupun masyarakat. Hal ini terbukti dari hasil penelitian di lapangan bahwa tidak tersedianya kader pemimpin atau Sumber Daya Manusia (SDM) yang dipersiapkan untuk menggantikan peran (PSP-3) untuk menjamin keberlanjutan program, tidak berfungsinya kelembagaan lokal untuk mengelola kegiatan produktif yang dijalankan oleh pemuda meskipun tanpa keberadaan (PSP-3).

Penilaian kriteria kesamaan (*equity*) program (PSP-3) di kota Samarinda dari kegiatan yang dilakukan oleh peserta (PSP-3) di lima kelurahan dinilai belum memberikan pengaruh perubahan kesejahteraan

dan perubahan ekonomi di kalangan pemuda dan masyarakat di lokasi penempatan.

Penilaian dari kriteria responsivitas (*responsiveness*) pada program (PSP-3) di kota Samarinda dinilai responsif karena program yang dilakukan bisa dirasakan semua kalangan dan dinikmati oleh pemuda ataupun masyarakat walaupun tidak berhasil secara keseluruhan.

Penilaian dari kriteria ketepatan program (PSP-3) yaitu program yang dilakukan belum tepat yaitu program budidaya ikan nila di Sungai Siring dan pembuatan tepung Mocaf di kelurahan Makroman . Untuk kegiatan budidaya ubi ungu dan keripik ubi ungu di kelurahan Sungai Siring, budidaya ikan lele dan kerupuk ikan lele di kelurahan Sungai Kapih sudah tepat dilakukan walaupun belum berhasil sedangkan untuk penanaman Tanaman Obat Keluarga (TOGA) di kelurahan Sindang Sari sudah tepat dan cukup berhasil serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar.

Daftar Pustaka

- Anonim. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 40 Tahun 2009, tentang *Kepemudaan*.
- _____. 2016. *Laporan Fact Finding Pemuda Mandiri Perdesaan (PMP) Berprestasi Provinsi Kalimantan Timur*.
- _____. 2016. *Laporan Akhir Kegiatan Peserta (PSP-3) di Kota Samarinda*
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada Univesity Press: Yogyakarta.
- Kemenpora RI. 2014. *Pedoman Umum Pelaksanaan Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan*. Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia: Jakarta.
- Kholifah, Siti dan I Wayan Suyadya. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Berbagi Pengalaman dari Lapangan*. Depok: RajaGrafindo.
- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Edisi Ketiga. Sage Publication.Inc: AS.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Penerbit Pustaka Pelajar: Yogyakarta.